

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021*. Tarempa: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Anonim. (2017). *Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman*. Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Anonim. (2018). *Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2018*. Tarempa: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Ekonomi Maritim* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asnawi, M. I. (2012). Implikasi Pemberlakuan Asas Cabotage dalam Pelayaran Nasional Terhadap Eksistensi Perusahaan Angkutan Laut Indonesia Pada Perdagangan Bebas dalam Kerangka WTO. Tesis: Magister Ilmu Hukum USU, Medan.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017. Berita Resmi Statistik, (33), 1–8. <https://doi.org/4102002>.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Buntoro, K. (2012). *Alur Laut Kepulauan Indonesia (Prospek dan Kendala)*. Jakarta: SESCOAL.
- Dick, H. W. (1989). *Industri Pelayaran Indonesia: Kompetisi dan Regulasi*. (Burhanudin & Maman, Eds.). Jakarta: LP3ES.
- Esterhuysen, A. (2018). Sea Power : A Guide for the Twenty-First Century (review), 68(2), 667–668. <https://doi.org/10.3892/ijo.2016.3767>.
- Fendos, J., Koo, B., & Lee, W. (2016). The role of Chinese cabotage in Northeast-Asian hub-port development and container shipbuilding. *International Journal of Maritime History*. <https://doi.org/10.1177/0843871416667414>.
- Francois, J. F., Arce, H. M., Reinert, K. A., & Flynn, J. E. (1996). Commercial Policy and the Domestic Carrying Trade. *The Canadian Journal of Economics*, 29(1). <http://www.jstor.org/stable/136158>.
- Hamid, E. S. (2004). Implementasi Cabotage Dalam Menunjang Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional UGM*, IX(2).
- Hussey, U. M. (2001). *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia-Buku 1*. Pustaka Sinar Harapan.
- Indriyani, R. (2012). Analisis Terhadap Implementasi Azas Cabotage pada Pelayaran di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Kepulauan. Tesis: Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
- Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783*. Boston: Little, Brown And Company.
- Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Martono, H. K., & Tjahjono, E. B. (2011). *Transportasi di Perairan Berdasarkan UU No 17 Thn 2008*. Jakarta: Rajawali Press.

- Mataram, H., 1980, Ketahanan Nasional sebagai Konsepsi-Kondisi-Strategi, *Bunga Rampai Ketahanan Nasional (Konsepsi dan Teori) I*. Jakarta: Ripress Utama.
- Motik, C. (2010). *75 Tahun Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. Lembaga Laut Indonesia, Ind Hill Co.
- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prihartono, B., & Dkk. (2015). *Konsep Tol Laut Dan Implementasi 2015 -2019*. Jakarta: Bapenas dan Kemenhub RI. Retrieved from [http://www.batukarinfo.com/system/files/Buku Tol Laut 2015 Lite.pdf](http://www.batukarinfo.com/system/files/Buku_Tol_Laut_2015_Lite.pdf)
- Purwaka, T. H. (1993). *Pelayaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putri, F., & Motik, C. (2013). Penerapan Asas Cabotage Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan Terhadap Kapal Penunjang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi. Fakultas Hukum UI. Retrieved from [http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S46423-Febriza Putri](http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-08/S46423-Febriza_Putri)
- Rumi, D. P. (2017). Implementasi Asas Cabotage Berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Industri Angkutan Laut Nasional dan Penerapannya dalam Mendukung Kebijakan Tol Laut. Tesis. Yogyakarta: Magister Hukum UGM.
- Soemarwoto, O. (2014). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (14th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sunardi, R. M. (1997). *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: Hastanas.
- Syamsudin, M. (2007). Urgensi dan kendala penerapan Azas cabotage dalam pelayaran domestik Indonesia di Era perdagangan bebas. *Mimbar Hukum UII*, 19.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widoyoko, A. (2013). Implementasi Asas Cabotage pada Inpres RI Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Indonesia. Tesis: Magister Hukum UGM, Yogyakarta

Peraturan Perundangan:

UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

UU No 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas

Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1963 tentang Perintah Mengerahkan Semua Alat Pengangkutan di Laut dalam Konfrontasi Bidang Ekonomi dengan Malaysia.

- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. (Pengganti Perpres Nomor 71 Tahun 2015).
- Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
- Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomer 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen:

- Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019, Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kota Tarempa 2015 dan 2019.
- Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, 2019, Muatan Tol Laut Tanjung Priok-Tarempa dan Muatan Balik Tol Laut Tarempa-Tanjung Priok 2018.
- PT. PELNI Persero, 2018, Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Penetapan Jalur Trayek Kapal Tol Laut 2018.
- Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla, 2018, Bahan Rapat Perkembangan Armada Niaga Nasional (per November 2018).

Sumber Internet:

- <http://anambaskab.go.id/blog/pemkab-anambas-buruh-pelabuhan-dan-kapal-tol-laut-bahas-sejumlah-persoalan>, diakses 2 November 2018.
- <http://hubla.dephub.go.id/berita/pages/evaluasi-trayek-pelayaran-tol-laut-dua-rute-pelayaran-trayek-tol-laut-berubah.aspx>, diakses 3 Januari 2019.

http://ppid.dephub.go.id/files/datahubla/SOP_Siupal_Siopsus.pdf, diakses 30 Maret 2019.

<https://batamtoday.com/home/read/120916/DBH-Migas-Dongkrak-Kenaikan-APBD-Anambas-2019>, diakses 25 Februari 2019.

<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/perjalanan-penemuan-cadangan-migas-sebelum-ri-merdeka-hingga-sekarang>, diakses 21 Februari 2019.

[https://medcoenergi.com/PT. Medco Energi Internasional Tbk, Siaran Pers tanggal 17 November 2016](https://medcoenergi.com/PT.MedcoEnergiInternasionalTbk,SiaranPerstanggal17November2016), diakses 25 Januari 2019

<https://katadata.co.id/berita/2016/09/19/medco-berpeluang-kelola-blok-b-south-natuna>, diakses 20 Januari 2019.

<http://www.m.batamtoday.com/berita56331-ConocoPhillips-Dipersilahkan-Hengkang-dari-Anambas.html>, diakses 5 Februari 2019.

<http://pidii.info/images/investasi/4th-editions/kab-kepulauan-anambas/Peta-Anambas.gif>, diakses 20 Agustus 2018.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190513/98/921713/2020-pelayaran-baru-bisa-penuhi-10-armada-batu-bara-ekspor> diakses 25 Juni 2019.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190409/98/909533/logistikos-menagih-keseriusan-asas-beyond-cabotage> diakses 25 Juni 2019.